

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh setelah melakukan pengkajian, sekaligus memberikan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam kesimpulan ini penulis akan memaparkan beberapa pokok penting yang merupakan inti jawaban dari permasalahan yang telah dikaji. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, pembentukan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru, ketidakpuasan guru terhadap organisasi profesi guru pada masa Orde Baru, serta kebebasan berdemokrasi yang termuat dalam kebijakan pendidikan era Reformasi. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru bersifat sentralistik, guru sangat bergantung kepada pemerintah dalam berbagai aspek termasuk aspek pedagogis. Ketergantungan ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan guru dan keterlibatannya dengan Golkar. Pemerintah menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mempertahankan ideologi negara.

Sistem ketergantungan guru terhadap pemerintah itu diatur melalui politik pendidikan Orde Baru yang sentralistik. Sistem pendidikan yang sentralistik menempatkan posisi pendidikan yang dapat menjadi alat seleksi, kontrol, sosialisasi nilai, dan pengetahuan untuk menciptakan kehidupan bersama. Pada

masa itu melalui Kepres No. 82 tahun 1971 dibentuk jajaran birokrasi sebagai abdi negara yang terhimpun dalam satu wadah KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia). Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai di Indonesia, salah satunya guru yang terhimpun dalam satu organisasi guru yaitu PGRI. Dengan adanya peraturan tersebut maka kebebasan berserikat dan berkumpul tidak terpenuhi, kondisi inilah yang nantinya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pecahnya tuntutan kebebasan berserikat dan berkumpul pada saat reformasi.

Ketidakpuasan guru terhadap organisasi yang menaunginya pada masa Orde Baru disebabkan karena adanya mobilisasi guru yang dilakukan oleh pemerintah. Meski PGRI terlibat karena adanya kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung memaksa PGRI menjadi salah satu bagian dari sentralisasi dan birokratisasi orde baru, namun ketidakpuasan tersebut tetap muncul karena kondisi guru yang menginginkan adanya perubahan. Selain itu banyak guru-guru khususnya di daerah menganggap kehadiran PGRI kurang dirasakan manfaatnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada tahun 2000, guru memberikan penilaian bahwa PGRI kurang bisa memperjuangkan kepentingan anggotanya. Sebanyak 59,2% guru menjawab PGRI belum ada manfaatnya, 31,6% guru menjawab PGRI tidak mampu memperjuangkan kesejahteraan guru, 14,4% tidak mampu menampung aspirasi guru, dan 16% tidak mampu memberi perlindungan hukum.

Faktor selanjutnya yang melatarbelakangi pembentukan FGII adalah kebebasan berdemokrasi yang muncul sejak reformasi 1998 dan termuat dalam

kebijakan pendidikan era Reformasi. Reformasi 1998 memberikan dampak terhadap kehidupan politik yang lebih demokratis, terjadi penurunan yang drastis terhadap legitimasi dan otoritas politik negara atas masyarakat. Dalam dunia pendidikan terjadi reformasi pendidikan, iklim dan proses pendidikan diharapkan dapat berjalan demokratis, begitu pula halnya dengan independensi dan kreatifitas guru terbuka lebar. Pada akhirnya guru juga memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya (*self realization*) untuk berserikat dan berkumpul, termasuk mengikuti atau bahkan membuat organisasi profesi baru yang dianggap dapat mewakili aspirasi mereka.

Kedua, sejak kemunculan dari awal berdirinya, FGII mengalami perkembangan dari segi jumlah anggota dan wilayah gerakannya. Diawali dengan kemunculan organisasi guru di berbagai daerah di Indonesia muncul sejak akhir tahun 1999. Di Jakarta berdiri Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP), di Bandung lahir Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), di Garut muncul Forum Guru Garut (FOGGAR), di Lampung hadir Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI), dan lain-lain. Kehadiran organisasi guru di tiap daerah menjadi alternatif dalam penyampaian aspirasi guru. Pada awalnya organisasi tersebut bergerak di daerah masing-masing, namun kemudian muncul keinginan bersama para guru untuk mendirikan organisasi yang bersifat nasional.

Keinginan untuk mendirikan organisasi guru yang bersifat nasional semakin besar ketika pada suatu kesempatan para organisasi guru ini duduk bersama dalam pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk guru yang diselenggarakan di Jakarta. Peristiwa ini menjadi sangat penting dalam

membangun konsolidasi antar organisasi guru tiap daerah. Kesepakatan bersama antar organisasi guru di tiap daerah adalah mendirikan induk organisasi yang berskala nasional. Maka terbentuklah Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) yang dideklarasikan dan didirikan pada tanggal 17 Januari 2002 di halaman Tugu Proklamasi Jakarta. Naskah deklarasi ditandatangani oleh 31 tokoh organisasi guru daerah, Suparman kemudian dipilih menjadi ketua umum FGII.

FGII mengalami perkembangan dalam segi keorganisasian maupun gerakan yang dilakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam segi keorganisasian FGII mengalami peningkatan jumlah anggota dari segi kuantitas dan wilayah. Anggota FGII mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2002-2008 yaitu bertambah dari 23.170 orang menjadi 59.599 orang. Pada tahun 2008 wilayah gerakan FGII meluas sampai ke wilayah Lampung, Sumatera Barat, Nusa Tenggara, dan seluruh wilayah Jawa. Perkembangan dalam gerakan yang dilakukan dapat dilihat dari kontribusi FGII terhadap pendidikan. FGII selalu reaktif terhadap isu-isu pendidikan yang berkembang, sehingga FGII menjadi sebuah organisasi yang bergerak dengan dinamis.

Ketiga, dalam menunjukkan peranannya FGII menyatakan sebagai organisasi guru independen yang menghimpun, memperjuangkan, memberikan advokasi dan perlindungan hukum kepada guru dalam menuntun hak-hak profesinya. FGII berusaha mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis, transparansi, berkeadilan, bermartabat dan profesional. Kehadiran FGII memberikan kesempatan bagi para guru dalam menyampaikan aspirasi dan perlindungan profesinya. FGII melakukan perlindungan hukum terhadap guru

yang mengalami kasus baik pemecatan oleh pihak sekolah maupun masalah dengan pemerintah. Beberapa kasus yang ditangani diantaranya adalah somasi Akbar Tandjung terhadap Retno guru SMA 13 Jakarta akibat penyusunan buku teks “Pendidikan Kewarganegaraan SMA”, pemecatan Nurlela guru SMP 56 Jakarta, dan advokasi terhadap Iwan Hermawan guru SMA Negeri 9 Bandung yang dituding menyebarkan berita bohong tentang kebocoran UN tahun 2006/2007. Semua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan pihak lain diantaranya Koalisi Pendidikan dan LBH.

FGII juga berperan sebagai pemerhati terhadap kebijakan pendidikan salah satunya tentang Ujian Nasional (UN). FGII menolak pelaksanaan UN karena dianggap melanggar hak pedagogis siswa dan guru. Setelah mengalami perjalanan panjang dengan melakukan audiensi ke Komisi X DPR dan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga pada akhirnya gugatan tersebut dikabulkan oleh pemerintah dengan tidak menjadikan UN sebagai satu-satunya patokan kelulusan siswa, tetapi pihak sekolah juga turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan tersebut tentunya bukan semata-mata karena jasa FGII karena banyak pihak lain yang memperjuangkan tentang UN juga. Namun dalam hal ini FGII berusaha menunjukkan kinerja gerakannya terutama dalam bidang kebijakan pendidikan.

Dalam peningkatan profesionalisme guru, FGII melakukan seminar pendidikan, pelatihan guru kritis, pelatihan HAM untuk guru, serta anggota FGII juga menjadi pembicara dalam seminar-seminar di kampus dan berbagai forum diskusi. Selain itu FGII juga berperan dalam mengawal dan penyusunan UU Guru

dan Dosen, beberapa usulan FGII diantaranya kebebasan guru untuk berserikat, organisasi guru harus bersifat independen dan diurus oleh guru, perhatian terhadap kesejahteraan guru, serta hak guru untuk memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menilai bahwa FGII menjadi sebuah organisasi baru yang dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia pendidikan Indonesia. Sebagai organisasi guru, FGII nampaknya berusaha konsisten untuk memperjuangkan nasib guru demi perbaikan pendidikan Indonesia yang lebih makro. FGII menjadi warna baru yang berbeda dalam gerakan guru di Indonesia, khususnya bertindak sebagai *pressure group* atau pengontrol kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian FGII menjadi salah satu bentuk perkembangan sejarah pergerakan guru di Indonesia khususnya pada era reformasi. Pada akhirnya peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa sebagai organisasi baru ternyata FGII memiliki peranan yang dapat diperhitungkan.